

TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

2023

Laporan Hasil Penilaian Terhadap Kapasitas dan Praktik Keterbukaan Keuangan Pada Tingkat Pengurus Pusat 9 Partai Politik Pemilik Kursi DPR RI



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL

Indonesia

the global coalition against corruption

dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Pada sub-indikator ketiga, pengarsipan hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD, 4 partai politik (Gerindra, Nasdem, PKB, PKS) memperoleh skor 3 di mana dokumen tersedia lengkap untuk 3 tahun yang dinilai, 1 partai politik (PDIP) memperoleh skor 2 di mana dokumen tersedia hanya untuk 2 tahun yang dinilai, 2 partai politik (Demokrat, PAN) memperoleh skor 1 di mana dokumen tersedia hanya untuk 1 tahun yang dinilai, dan 2 partai politik (Golkar, PPP) memperoleh skor 0 di mana dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

Terakhir, pada sub-indikator keempat, pengarsipan laporan audit keuangan partai politik oleh akuntan publik, 1 partai politik (Gerindra) memperoleh skor 3 di mana dokumen tersedia lengkap untuk 3 tahun yang dinilai, 1 partai politik (PKS) memperoleh skor 2 di mana dokumen tersedia hanya untuk 2 tahun yang dinilai, dan 7 partai politik lainnya (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP) memperoleh skor 0 di mana dokumen untuk tahun yang dinilai tidak tersedia sama sekali/tidak dapat dikonfirmasi ketersediaannya.

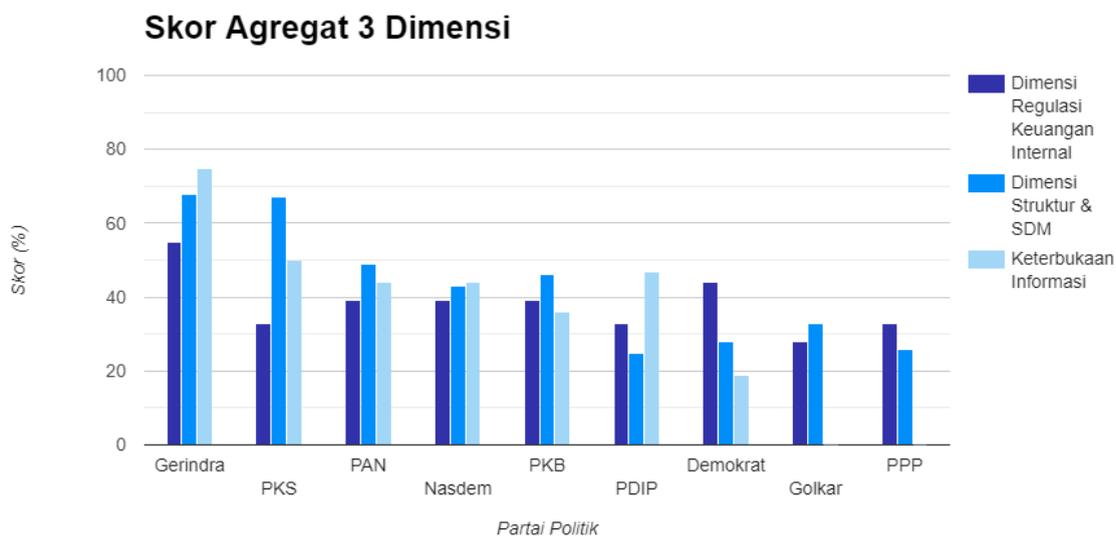
Pengarsipan										
No.	Dokumen	Partai Politik								
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP
1.	Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik	3	0	3	1	3	0	3	3	0
2.	Pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima	0	0	1	0	0	0	0	0	0
3.	Hasil audit BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD	2	0	3	3	3	1	3	1	0
4.	Laporan audit keuangan partai	0	0	3	0	0	0	2	0	0

	politik oleh akuntan publik									
Jumlah		5	0	10	4	6	1	8	4	0
<p>Keterangan:</p> <p>Skor 0: tidak tersedia/tidak dapat dikonfirmasi.</p> <p>Skor 1: Ada untuk 1 tahun periode keuangan dalam rentang 2020-2022.</p> <p>Skor 2: Ada untuk 2 tahun periode keuangan dalam rentang 2020-2022.</p> <p>Skor 3: Ada untuk 3 tahun periode keuangan dalam rentang 2020-2022</p>										

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan



Skor Agregat Per Dimensi											
No.	Dimensi	Partai Politik									Rerata (\bar{x})
		PDIP	Golkar	Gerindra	Nasdem	PKB	Demokrat	PKS	PAN	PPP	
1.	Regulasi keuangan internal	6/18 (33%)	5/18 (28%)	10/18 (55%)	7/18 (39%)	7/18 (39%)	8/18 (44%)	6/18 (33%)	7/18 (39%)	6/18 (33%)	6,89/18 (38%)
2.	Struktur & SDM	18/72 (25%)	24/72 (33%)	49/72 (68%)	31/72 (43%)	33/72 (46%)	20/72 (28%)	48/72 (67%)	35/72 (49%)	19/72 (26%)	30,78/72 (43%)
3.	Keterbukaan Informasi	17/36 (47%)	0/36 (0%)	27/36 (75%)	16/36 (44%)	13/36 (36%)	7/36 (19%)	18/36 (50%)	16/36 (44%)	0/36 (0%)	12,67/36 (35%)
Jumlah		41/126 (32%)	29/126 (23%)	86/126 (68%)	54/126 (42%)	53/126 (42%)	35/126 (28%)	72/126 (57%)	58/126 (46%)	25/126 (20%)	
Rerata (\bar{x}) = (40%)											

Penilaian terhadap kapasitas dan praktik keterbukaan keuangan pada tingkat pengurus pusat 9 partai politik pemilik kursi DPR RI menunjukkan bahwa dalam tiga dimensi – regulasi keuangan di tingkat internal, struktur dan sumber daya manusia, dan keterbukaan informasi – berbagai upaya optimalisasi masih perlu dilakukan oleh kesembilan partai politik. Terlihat dalam bagan, pada setiap dimensi rerata yang diperoleh kesembilan partai politik masih berkisar pada rentang cenderung tidak optimal (26%-50% dari skor maksimum).

- Pada dimensi regulasi keuangan internal, 1 partai politik (Gerindra) terkategori cenderung optimal dan 8 partai politik (PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP) terkategori cenderung tidak optimal.
- Pada dimensi struktur dan sumber daya manusia, 2 partai politik (Gerindra, PKS) terkategori cenderung optimal, 6 partai politik (Golkar, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, PPP) terkategori cenderung tidak optimal, dan 1 partai politik (PDIP) terkategori tidak optimal.
- Pada dimensi keterbukaan informasi, 1 partai politik (Gerindra) terkategori cenderung optimal, 5 partai politik (PDIP, Nasdem, PKB, PKS, PAN) terkategori cenderung tidak optimal, dan 3 partai politik (Golkar, Demokrat, PPP) terkategori tidak optimal.

Sebagaimana tersaji dalam temuan diatas, kesembilan partai politik bahkan tidak selalu mematuhi standar yang ditentukan oleh undang-undang, seperti misalnya (yang paling mencolok), 8 dari 9 partai politik sama sekali tidak membuka pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterimanya. Selain itu, untuk memperoleh informasi yang tidak tersedia dalam *website* resmi partai politik, seluruh partai politik merespons permintaan informasi melewati batas waktu dan di luar cara yang ditentukan undang-undang (paling lambat 10 hari kerja sejak permintaan diajukan, didahului pemberitahuan tertulis), atau bahkan tidak merespons sama sekali.

Kesembilan partai politik juga terlihat belum melakukan tindak lanjut terhadap Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dicanangkan KPK dan LIPI pada 2018 silam (paling tidak yang menyangkut komponen keuangan). Ini terbukti berdasarkan fakta di mana misalnya tidak satu pun dari partai politik yang dinilai memiliki unit pengawasan internal keuangan partai politik. Alasan yang diberikan sebagian partai politik dalam kesempatan wawancara pun terbilang sangat sederhana, yakni bahwa fungsi telah berjalan dengan struktur yang ada dan internal partai politik belum menilai tindak lanjut semacam itu dibutuhkan. Argumentasi ini jelas luput memperhitungkan adanya preseden di mana uang hasil kejahatan pernah mengalir ke tubuh partai politik.

Ditinjau dari sisi profesionalisme kelembagaan, kesembilan partai politik juga memperlihatkan bahwa profesionalisme belum sepenuhnya menjadi kultur di internal partai politik. Respons partai politik atas permohonan informasi publik seperti di singgung sebelumnya tentu dapat menjadi contoh. Namun di samping itu penilaian ini juga turut menunjukkan betapa upaya partai politik untuk menjadi lebih profesional sebenarnya masih terbilang lemah. Hal ini dibuktikan misalnya oleh langkanya program penguatan kapasitas internal yang dijalankan oleh partai politik.



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL**

 **Indonesia**

the global coalition against corruption